GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Kompas**	**Tanggal**	**: 04 Januari 2007**
Subyek	**: Kerugian Akibat Banjir**	**Hari**	**: Kamis**
		Halaman	**: 25**

Kerugian akibat Banjir Rp 95 Miliar Per Hari

jakarta, kompas - Sebanyak 13 sungai dari sembilan muara di Jakarta hingga kini masih tertutup sampah sehingga banjir pun tinggal menunggu waktu untuk kembali. Masyarakat pun dihantui bakal merugi akibat banjir sebesar Rp 95 miliar per hari.

Jumlah itu jauh lebih tinggi dari nilai penanggulangan banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya Rp 500 miliar per tahun. "Masyarakat tidak menyadari besarnya kerugian karena tidak secara langsung memengaruhi ekonominya saat ini. Di sisi lain, pemerintah jelas tidak mampu memberi contoh panutan berperilaku. Program pemerintah belum menyentuh dasar masalah sehingga belum mampu menyelesaikannya," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ahmad Heryawan, Rabu (3/1).

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Selamet Daroyni mengatakan, pemerintah melakukan pembodohan dengan menghadapi bencana banjir sekadar bencana rutin tahunan. Reaksi pemerintah setiap kali banjir datang terkesan biasa saja dan reaksioner.

"Pemerintah selalu alpa mengingatkan warganya terutama di 78 titik rawan banjir untuk waspada sejak awal. Dari arah kebijakannya, tidak pernah ada perubahan fundamental dari sudut pembangunan kota oleh pemerintah daerah, seperti proyek reklamasi pantura yang akan menenggelamkan Jakarta," kata Selamet Daroyni.

Berdasarkan data dari Walhi dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dalam beberapa tahun terakhir bahkan hingga dua kali setahun masyarakat harus bersiap kehilangan akses bekerja, terganggu kesehatan, gangguan kenyamanan, kerusakan fisik bangunan, dan perbaikan rumah.

Sedikitnya terdapat 370.167 kepala keluarga dalam 514 RW di Jakarta yang harus menanggung kerugian Rp 92.541.689.017 per hari. Semakin sering banjir datang, angka kerugian ini dipastikan terus merangkak naik.

Pada tahun ini, diharapkan ada perubahan arah kebijakan pemerintah daerah yang berbasis pelestarian lingkungan. (nel)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup